



PENUNTASAN DILAKUKAN BERTAHAP

160 Rumah Tak Layak Huni Berhasil Tertangani

YOGYA (KR) - Upaya perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) masih menjadi program rutin tahunan. Penuntasan dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran. Sepanjang tahun ini sudah berhasil tertangani sebanyak 160 unit.

Kepala Seksi atau Analis Kebijakan Ahli Muda Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Yunita Rahmi Hapsari, mengungkapkan penanganan rumah tak layak huni tersebut sebenarnya dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan. "Tidak hanya bersumber dari APBD Kota Yogya saja tetapi ada juga dukungan dari APBD DIY dan bantuan dari corporate social responsibility (CSR)," jelasnya, Kamis (15/12).

Pada akhir 2021, terdapat 2.187 rumah tidak layak huni di Kota Yogya. Sedangkan pada

tahun ini dapat ditangani sebanyak 160 unit, sehingga diperkirakan masih tersisa sebanyak 2.027 unit sampai akhir tahun. Akan tetapi masih ada tujuh unit rumah tak layak huni yang masih dalam penanganan serta ada tambahan perbaikan 21 unit melalui anggaran perubahan DIY. Data itu pun masih dikonfirmasi ulang ke Pemda DIY.

DPUPKP Kota Yogya, imbuhnya, sudah memiliki basis data terkait rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran penanganan. Meski demikian tidak menutup kemungkinan bagi wilayah untuk melapor jika di kawasan masih terdapat rumah tidak layak huni. "Nanti akan kami verifikasi dan jika memenuhi syarat sebagai sasaran penanganan, maka akan masuk dalam basis data. Tapi untuk penanganannya didasarkan pada prioritas," imbuh Yunita.

Indikator rumah tak layak huni tersebut tidak semata dili-

hat dari fisik bangunan. Melainkan juga harus memenuhi unsur kesehatan seperti ventilasi, pencahayaan, sirkulasi udara dan kecukupan ruang. Setiap rumah yang menjadi sasaran penanganan rumah tidak layak huni mendapat bantuan dana perbaikan sekitar Rp 20 juta. Namun demikian, nilai bantuan bisa kurang atau lebih tergantung kebutuhan penanganan yang diprioritaskan.

Target atau sasaran yang ditangani oleh Pemkot Yogya juga memiliki kriteria tertentu. Khususnya rumah tak layak huni yang status alas haknya jelas. Hal ini karena berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran pemerintah. Sedangkan terhadap rumah tak layak huni yang statusnya belum jelas, ditangani oleh pihak lain melalui CSR. Belum lama ini Forum CSR Kota Yogya pada tahun ini juga memberikan bantuan penanganan rumah tak layak huni terhadap lima

unit yang tersebar di lima kelurahan. Setiap rumah menda-

pat bantuan dana perbaikan Rp 20 juta. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005